

## ABSTRAK

### POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORUPSI DI KOTA MEDAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

● Oleh :

HERI SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN

NPM : 07.840.0201

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi sekarang maupun masa yang akan datang tetap merupakan ancaman yang serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan pada khususnya bangsa Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara.

Tujuan hukum (goal of law) di atas yang dikemukakan oleh Paul John Collins dkk. Masih perlu dilengkapi dengan pendapat sarjana lainnya sehingga kita memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif apa sebenarnya tujuan hukum bagi kehidupan manusia. Hal ini juga sebagai bahan kontemplasi baik bagi para ahli hukum, praktisi hukum, politisi, maupun anggota masyarakat bahwa hukum memiliki tujuan yang luhur dan tidak semestinya dipermainkan oleh penguasa tirani. Apabila kita melihat kondisi supremasi hukum di Indonesia sungguh memprihatinkan sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta ketertiban merupakan suatu barang mahal.

Korupsi berasal dari kata lain "Corruption" atau "Corruptus" dimana dua kata itu berasal dari satu kata latin yang lebih tua yaitu "Corrum Page". Selanjutnya dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris Corruption, Corrupti bahasa Prancis, Corruptipon, dalam bahasa Belanda Corruptie. Dari bahasa Belanda turun ke bahasa Indonesia Korupsi. Secara harfiah kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Penyimpangan dari kesucian maupun kata-kata atau ucapan yang mengkhina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam berbagai literature.

Pemberantasan korupsi dewasa ini sudah menjadi agenda masyarakat internasional. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.